

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bakal Sasar Lebih dari 238.000 Siswa

JAKARTA, KOMPAS — Warga kurang mampu di DKI Jakarta menjadi sasaran utama dari program sekolah swasta gratis. Lebih dari 238.000 siswa diproyeksikan menjadi sasaran program ini.

Terkait anggaran untuk program ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, hasil kajian dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para konsultan beberapa bulan lalu, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta diperkirakan Rp 2,3 triliun per tahun.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mencapai Rp 2,8 triliun setiap tahun. Dengan alokasi anggaran tersebut, program sekolah swasta gratis ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa di sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Selisih uang sekitar Rp 500 miliar ini nantinya bisa diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya, seperti untuk membeli seragam, alat tulis-menulis, dan keperluan lain," katanya, Selasa (27/8/2024).

Akan tetapi, berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada 2024 ini, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 533.649 siswa dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Menurut Iman, kebijakan sekolah gratis di swasta baru akan diterapkan pada 2025 karena Dinas Pendidikan DKI masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Di sisi lain, DPRD DKI akan mematangkan konsep sekolah gratis melalui kebijakan anggaran.

"Ini juga dilakukan karena banyaknya persoalan yang masuk terkait ijazah ditahan oleh pihak sekolah karena orang tua tidak mampu membayar iuran sekolah setiap bulan. Nantinya, persoalan ini akan diselesaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029," kata Iman.

Di samping itu, sekolah gratis ini digaungkan karena gagalannya sejumlah penerima KJP di berbagai jalur penerimaan peserta didik baru

Di samping itu, sekolah gratis ini digaungkan karena gagalannya sejumlah penerima KJP di berbagai jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2024 ini.

(PPDB) pada 2024 ini. Penerima Kartu Indonesia

Pintar (KIP) di sejumlah daerah juga banyak yang tidak kebagian bangku sekolah atau gagal dalam seleksi PPDB.

Nantinya, jumlah kuota siswa akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta di DKI Jakarta. Lewat kebijakan ini, anak-anak yang gagal dalam PPDB di sekolah negeri tidak perlu khawatir karena tetap bisa mengenyam pendidikan yang biayanya ditanggung negara di sekolah swasta yang dekat dengan rumahnya.

Untuk keadilan

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menekankan, program sekolah swasta gratis ini demi keadilan sosial karena keterbatasan kuota sekolah negeri.

KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Program ini diutamakan bagi pelajar yang orangtuanya masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta.

Untuk sekolah gratis ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara bertahap akan menawarkan kerja sama kepada 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat sehingga dapat berjalan pada 2025. Pada saat yang sama juga disiapkan program pengganti KJP Plus yang akan dihapus.

Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, sekolah swasta gratis ini penting. Namun, pengawasannya harus diperhatikan. Jika tidak, sulit memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. (TIK)